

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang dalam aspek pendidikan masih memiliki masalah sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada indeks pembangunan manusia (IPM) yang memiliki permasalahan dan menjadi fenomena yang menarik untuk dilakukan analisis dalam penelitian oleh penulis, seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Tahun 2022

Kabupaten Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (2022)	Rata Rata Lama Sekolah (2022)	Indeks Pembangunan Manusia (2022)
Kota Salatiga	15.43	10.95	84.35
Kota Semarang	15.54	10.80	84.08
Kota Surakarta	14.89	10.92	83.08
Kota Magelang	14.31	10.94	80.39
Kabupaten Sukoharjo	13.90	9.62	77.94
Kabupaten Klaten	13.40	9.09	76.95
Kota Tegal	13.08	7.25	76.15
Kota Pekalongan	12.86	9.20	75.90
Kabupaten Kudus	13.25	9.06	75.89
Kabupaten Boyolali	12.62	8.08	74.97

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2022

Penulis menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dengan tujuan untuk mengetahui capaian angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan temuan pertama dalam penelitian ini. Indeks pembangunan manusia sendiri digunakan untuk : (a).menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan

dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. (b).merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. (c) menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Dari semua Kabupaten dan Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, penulis menemukan setidaknya ada sepuluh daerah yang masuk dalam kategori Kabupaten dan Kota yang memiliki capaian indeks pembangunan manusia berkategori baik, apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tingkat nasional. Pada tabel diatas juga diperlihatkan bahwa Kabupaten Klaten yang berada pada urutan ke-6 memiliki capaian angka indeks pembangunan manusia sebesar 76,95 angka yang bisa dikatakan baik apabila dibandingkan dengan pencapaian IPM nasional. Namun jika tabel diatas lebih kita cermati lagi, terdapat fenomena yang ditemukan oleh penulis dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai fokus dalam penelitian ini. Penulis melihat bahwa Kabupaten Klaten yang berada pada posisi ke-6 seharusnya memang wajar apabila memiliki angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dari Kota dan Kabupaten yang berada di atasnya, namun terkhusus pada angka rata-rata lama sekolah, Kabupaten Klaten ternyata memiliki angka yang lebih rendah dari pada Kota Pekalongan yang dimana pada tabel tersebut Kota Pekalongan berada pada urutan ke delapan, dua tingkat lebih rendah daripada kabupaten Klaten dalam peringkatnya. Perbedaan dalam capaian angka rata-rata lama sekolah ini menjadi fenomena yang menarik bagi penulis untuk diteliti.

Data lain yang juga dapat memperkuat bahwa kualitas pendidikan di kabupaten Klaten masih membutuhkan perbaikan serta perlu untuk diteliti adalah, dikarenakan Klaten memiliki angka partisipasi murni yang tidak stabil/fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Klaten Tahun 2021-2026 pada bab IV tentang

permasalahan dan isu strategis daerah, aspek pendidikan masih memiliki permasalahan terutama dalam proses penyelenggaraannya. Dalam penelitian ini penulis fokus pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang dimana tanggung jawab dalam pengelolaannya diberikan kepada pemerintah daerah, adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Jenjang APM	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
APM SD/MI/Paket A	%	86,84	90,84	88,30	88,54	83,91
APM SMP/MTs/Paket B	%	66,22	73,21	73,05	71,14	72,11
APM SMA/SMK/MA/Paket c	%	54,48	60,26	60,90	63,58	64,63

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Klaten 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase (Safira & Wibowo, 2021). Angka Partisipasi Murni digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai, semakin tinggi angka partisipasi murni maka menunjukkan bahwa tingginya jumlah anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi pada jenjang pendidikan tertentu (Safira & Wibowo, 2021). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya perkembangan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Klaten mengalami fluktuasi setiap tahunnya atau tidak stabil dan bahkan cenderung menurun. Hal lain yang juga menjadi permasalahan yakni terjadinya juga fluktuasi pada capaian angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTS/Paket B di Kabupaten Klaten. Berikut ini perkembangan tabel yang memperlihatkan perkembangan angka putus sekolah di kabupaten Klaten:

Tabel 1.3
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2017-2021

Jenjang Angka Putus Sekolah (APS)	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
APS SD/MI	%	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02
APS SMP/MTs	%	0,23	0,06	0,05	0,08	0,05
APM SMA/SMK/MA	%	0,63	0,67	0,53	0,48	-

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Klaten 2023

Sedangkan Angka putus sekolah merupakan angka yang memperlihatkan proporsi anak berdasarkan usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan. Meskipun mengalami fluktuasi, namun dalam perkembangannya dalam beberapa tahun angka putus sekolah cenderung menurun. Dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah, dijelaskan bahwa penurunan ini terjadi dikarenakan adanya bantuan yang diberikan pada bidang pendidikan. Adapun bantuan-bantuan tersebut bersumber dari biaya operasional sekolah (BOS) dan program indonesia pintar (PIP). Fluktuasi angka-angka diatas yang memperlihatkan ketidakstabilan tentu masih menjadi fenomena yang harus mendapat perhatian dan evaluasi oleh pemerintah. Disebutkan dalam dokumen tersebut bahwa salah satu sumber dana bantuan berasal dari program Indonesia pintar yang dimana program ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Untuk mengetahui apakah pembagian dana tersebut memiliki dampak yang efektif pada kondisi pendidikan di Kabupaten Klaten, maka selanjutnya penulis akan melakukan penelitian. Selanjutnya peneliti akan menampilkan terlebih dahulu rincian pencairan dana Program Indonesia Pintar di Kabupaten Klaten, dan diseluruh Indonesia. Penulis mendapatkan data dari website pip.kemdikbud.go.id, adapun data penyaluran dana Program Indonesia Pintar untuk Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut :

Tabel 1.4

Rincian Penyaluran Dana PIP SMP di Kabupaten Klaten Berdasarkan Kecamatan Tahun
Anggaran 2022

No	NAMA SMP DAN KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH DANA
1.	SMP N 2 BAYAT	14	Rp.7.500.000
2.	SMP N 3 CAWAS	14	Rp.8.250.000
3.	SMP N 1 CEPER	23	Rp.14.250.000
4.	SMP N 4 DELANGGU	34	Rp.21.000.000
5.	SMP N 2 GANTIWARNO	31	Rp.19.125.000
6.	SMP N 1 JATINOM	24	Rp.18.000.000
7.	SMP N 2 JOGONALAN	18	Rp.10.875.000
8.	SMP N 2 JUWIRING	31	Rp.23.250.000
9.	SMP N 1 KALIKOTES	64	Rp.34.875.000
10.	SMP N 1 KARANGANOM	44	Rp.31.125.000
11.	SMP N 3 KARANGDOWO	33	Rp.24.750.000
12.	SMP N 1 KARANGNONGKO	16	Rp.7.125.000
13.	SMP N 1 KEBON ARUM	31	Rp.18.000.000
14.	SMP N 1 KEMALANG	19	Rp.11.625.000
15.	SMP N 2 KLATEN	60	Rp.43.875.000
16.	SMP N 3 KLATEN TENGAH	64	Rp.43.125.000
17.	SMP N 1 KLATEN UTARA	47	Rp.34.125.000
18.	SMP N 1 MANISRENGGO	32	Rp.21.000.000
19.	SMP N 1 NGAWEN	30	Rp.18.375.000
20.	SMP N 2 PEDAN	41	Rp.25.875.000
21.	SMP 1 POLANHARJO	10	Rp.4.125.000
22.	SMP N 2 PRAMBANAN	21	Rp.13.125.000
23.	SMP 1 TRUCUK	22	Rp.13.125.000
24.	SMP 1 TULUNG	18	Rp.10.500.000
25.	SMP 1 WEDI	26	Rp.13.500.000
26.	SMP 1 WONOSARI	45	Rp.26.250.000

Sumber : Website pip.kemdikbud.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klaten yang sudah melakukan pencairan dana PIP terbanyak di bandingkan sekolah lain, yaitu SMP N 2 Klaten, sekolah ini yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi untuk penelitian dan akan dilakukan wawancara guna mengetahui secara

langsung dan lebih dalam berkaitan dengan efektivitas bantuan PIP di sekolah tersebut. Data tersebut juga sudah penulis olah dengan hanya memasukan sekolah yang melakukan pencairan dana terbanyak dibandingkan semua sekolah menengah pertama pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Klaten.

Tabel 1.5
Rincian Penyaluran Dana di setiap provinsi di Indonesia untuk Tahun 2022

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH SISWA	JUMLAH DANA AKTIVASI
1.	ACEH	54.893	Rp. 30.147.375.000
2.	BALI	2.246	Rp. 1.368.375.000
3.	BANTEN	7.655	Rp. 5.087.250.000
4.	BENGKULU	1.898	Rp. 1.310.625.000
5.	D.I. YOGYAKARTA	3.288	Rp. 2.218.875.000
6.	DKI JAKARTA	5.691	Rp. 3.774.750.000
7.	GORONTALO	1.093	Rp. 702.750.000
8.	JAMBI	1.168	Rp. 804.375.000
9.	JAWA BARAT	53.820	Rp. 34.760.250.000
10.	JAWA TENGAH	48.491	Rp. 32.758.875.000
11.	JAWA TIMUR	36.897	Rp. 24.965.625.000
12.	KALIMANTAN BARAT	3.431	Rp. 2.350.125.000
13.	KALIMANTAN SELATAN	1.357	Rp. 964.500.000
14.	KALIMANTAN TENGAH	1.436	Rp. 932.250.000
15.	KALIMANTAN TIMUR	1.132	Rp. 793.500.000
16.	KALIMANTAN UTARA	634	Rp. 430.125.000
17.	BANGKA BELITUNG	716	Rp. 518.625.000
18.	KEPULAUAN RIAU	857	Rp. 548.250.000
19.	LAMPUNG	5.844	Rp. 3.918.000.000
20.	MALUKU	1.689	Rp. 994.875.000
21.	MALUKU UTARA	936	Rp. 687.000.000
22.	NUSA TENGGARA BARAT	4.668	Rp. 113.250.000
23.	NUSA TENGGARA TIMUR	6.429	Rp. 4.042.125.000
24.	PAPUA	2.812	Rp. 1.792.875.000
25.	PAPUA BARAT	1.140	Rp. 818.250.000
26.	RIAU	2.338	Rp. 1.554.000.000
27.	SULAWESI BARAT	1.482	Rp. 1.060.875.000
28.	SULAWESI SELATAN	8.209	Rp. 5.565.375.000
29.	SULAWESI TENGAH	2.722	Rp. 1.807.500.000
30.	SULAWESI TENGGARA	3.068	Rp. 1.939.875.000
31.	SULAWESI UTARA	3.446	Rp. 2.429.250.000
32.	SUMATERA BARAT	5.454	Rp. 3.300.375.000
33.	SUMATERA SELATAN	4.463	Rp. 3.014.250.000
34.	SUMATERA UTARA	21.509	Rp. 14.323.125.000

Sumber : Website pip.kemdikbud.go.id

Tabel diatas penulis tampilkan untuk memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang sudah melakukan pencairan dana Program Indonesia

Pintar yang paling banyak ke-2 (dua) di Indonesia setelah Jawa Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa Jawa Tengah menjadi wilayah yang juga tepat untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan Program Indonesia Pintar. Semua data yang sudah ditampilkan diatas tentu memiliki kaitan dengan capaian angka putus sekolah dan angka partisipasi murni di Kabupaten Klaten. Dari data-data dan sumber literatur yang penulis tampilkan diatas memperlihatkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Klaten masih ditemukan masalah. Dengan bantuan yang telah diberikan Pemerintah. Daerah seharusnya mampu untuk mengelola pelayanan pendidikan dengan dana yang dimiliki .

Penulis mengangkat topik pendidikan dikarenakan pendidikan menjadi aspek yang penting dalam kehidupan manusia, dan topik ini juga cukup relevan dengan isu-isu yang sedang berkembang pada saat ini dimana pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian positif pada bonus demografi di Indonesia pada tahun 2045 dan memiliki kaitan dengan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional(RPJPN) 2025-2045. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya di Asia, berdasarkan survey yang dilakukan oleh *United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization*, kualitas pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara-negara berkembang yang ada di Asia Pasifik (Fajri, 2017). Adapun beberapa hal yang menjadi sumber permasalahan pada kualitas pendidikan salah satunya dikarenakan belum meratanya penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya pembangunan di daerah-daerah terluar dan terpencil, sehingga mereka yang tinggal di daerah tersebut mengalami kesulitan untuk dapat mengakses layanan pendidikan yang ada dan yang telah di distribusikan oleh pemerintah (Fajri, 2017). Permasalahan ini akan menjadi hal yang serius mengingat bahwa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat

(4) menyatakan bahwa “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut sampai dengan hari ini, pendidikan di Indonesia masih menjadi aspek yang bermasalah dalam kehidupan masyarakat dan belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih dan konsistensi untuk dapat memperbaikinya.

Demi untuk memperbaiki permasalahan pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dengan fokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara adil dengan cara meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang bermukim pada daerah tertinggal. Kebijakan ini juga tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Pemerintah telah melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, salah satunya dengan membuat Program Indonesia Pintar (Yusup et al., 2019). Program Indonesia Pintar atau yang disingkat dengan (PIP) merupakan penyempurnaan dari program pendidikan sebelumnya yakni program Bantuan Siswa Miskin atau (BSM).

Program Indonesia Pintar telah dikeluarkan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Berkaitan dengan urusan layanan pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menjadi tanggung jawab pemerintah

Kabupaten dan Kota sedangkan pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Dalam peraturan tersebut secara eksplisit pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Kemudian Program Indonesia Pintar memiliki 3 tujuan bagi pendidikan dasar dan menengah yakni : (a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (b) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau (c) menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau yang tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Apabila dikaitkan dengan data yang sudah ditampilkan diatas pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Klaten, penurunan pada angka putus sekolah terjadi dikarenakan adanya bantuan yang diberikan pada bidang pendidikan. Hal ini menandakan bahwa sebetulnya kebutuhan pada bidang pendidikan memang membutuhkan bantuan, dan kebutuhan tersebut diklaim sudah terpenuhi dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Artinya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia,

pemerintah sebenarnya telah mengupayakan dengan membuat program Indonesia pintar yang memberikan bantuan dana kepada siswa maupun mahasiswa.

Meskipun demikian, data di atas masih memperlihatkan adanya fenomena berupa fluktuasi pada capaian angka-angka indikator pendidikan dan menjadi hal yang menarik untuk dapat diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah program Indonesia pintar sebenarnya memiliki keterkaitan dan bisa efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten terutama dalam pelayanan di pendidikan dasar. Penulis memilih tingkat pendidikan dasar dan jenjang sekolah menengah pertama, dikarenakan tingkatan sekolah dasar dalam tanggung jawab pengelolaannya diberikan kepada Pemerintah daerah sebagai bentuk pembagian urusan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan data-data yang berkaitan dengan pendidikan melalui latar belakang penelitian, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas yang telah dicapai untuk dapat meningkatkan kualitas siswa pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di SMP N 2 Kabupaten Klaten setelah adanya bantuan dari program Indonesia pintar. Indikator yang penulis gunakan untuk mengetahui efektivitas dalam penelitian ini yaitu: 1) keberhasilan program, 2) keberhasilan dalam menjangkau sasaran, 3) kepuasan terhadap program, dan 4) pencapaian tujuan secara menyeluruh. Indikator tersebut akan diketahui dengan melakukan wawancara di lapangan, kemudian hasil dari wawancara akan dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan di SMP N 2 Klaten sudah berjalan dengan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut. Setelah itu penulis akan menghasilkan kesimpulan apakah program berjalan efektif atau sebaliknya, serta

menguraikan alasan dibalik kesimpulan tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas program Indonesia pintar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP N 2 Kabupaten Klaten ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program Indonesia pintar dalam meningkatkan kualitas di SMP N 2 Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas program Indonesia pintar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP N 2 Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program Indonesia pintar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP N 2 Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kabupaten Klaten , penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk kembali melakukan kajian dan merancang dokumen monitoring & evaluasi terhadap kebijakan Program Indonesia Pintar yang diimplementasikan di Klaten.
2. Bagi peneliti , penelitian ini dapat berguna sebagai implementasi ilmu dalam program studi Ilmu Pemerintahan serta menjadi syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .

3. Bagi mahasiswa umum ,penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi penelitian lainnya yang akan memperdalam topik penelitian ini di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka

1.1 Efektivitas Program

Kata efektif sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa inggris *effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan cara yang baik dan memunculkan hasil. Efektivitas sendiri dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam penggunaan, penunjang tujuan atau hasil. Efektivitas dapat tercapai apabila dalam proses mencapai tujuan dari program atau kebijakan menawarkan sebuah gagasan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sasaran dari program tersebut, dan program tersebut dapat dicapai sesuai dengan tujuan diawal(Priohutomo & Atmojo, 2020). Ketika sebuah program direncanakan, hanya akan berjalan efektif apabila dalam pelaksanaannya terdapat juga kesesuaian antara organisasi atau kelompok yang melaksanakan program tersebut dengan program yang dibuat, hal ini dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan tersebut organisasi atau kelompok yang menjalankan memang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dan tidak menemukan kesulitan yang akan menghambat dalam prosesnya(Rachman, 2022). Efektivitas biasanya dapat diukur dengan membandingkan ketercapaian sebuah program sebelumnya dengan rencana yang sedang dirancang, Input dan output juga tidak luput dari hal yang mengukur efektivitas sebuah program tersebut, input sebagai upaya yang dilakukan untuk menjalankan program tersebut seperti biaya, waktu, sumber daya manusia akan berhasil apabila juga menghasilkan output seperti meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi sasaran program atau meningkatnya pemahaman

organisasi dalam menjalankan sebuah tugas yang mereka miliki. Hal terakhir yang menjadi penting adalah sudah seberapa jauh organisasi tersebut bekerja untuk mencapai tujuan suatu program, apabila mereka sudah melaksanakan berbagai macam tahap seperti ketepatan waktu program ,terlaksananya semua rencana program dan dalam setiap tahapan tersebut telah berperan dalam mencapai tujuan yang ditentukan dari awal, maka sebuah program tersebut sudah dapat dikatakan efektif.

Menurut Campbell J.P pengukuran efektivitas dapat dilihat dengan cara yakni, melakukan pengukuran dalam arti untuk mengetahui tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas digunakan untuk membandingkan antara rencana yang ada dengan proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai (Saragih, 2018).

- a) Adapun indikator efektifitas Menurut Campbell dalam (Mutiarin, 2014) di dalam melakukan pengukuran tingkat efektivitas dari program, kegiatan, maupun organisasi memiliki beberapa pengukuran yang paling menonjol diantaranya :

1) Keberhasilan Program

Menurut David C. Korten (1984: 180) Keberhasilan kegiatan kerja dari sebuah program pembangunan berfungsi sebagai sarana untuk saling membantu antara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan, serta program dan organisasi. Secara lebih rinci, proses pengembangan program akan berujung pada kekacauan kelompok jika tidak ada hubungan yang jelas antara kebutuhan pihak-pihak yang menerima manfaat dan hasil program terhadap persyaratan yang dinyatakan oleh organisasi penerima manfaat. Korten menyatakan bahwasanya suatu

program akan mencapai keberhasilan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan dari suatu program dengan yang dibutuhkan oleh suatu kelompok atau sasaran program tersebut, kedua kesesuaian antara program dengan organisasi yang melaksanakan program tersebut, harus memiliki kesesuaian dalam tugas dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut, dan ketiga kesesuaian antara syarat yang ditetapkan oleh organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Faza & Suwitri, 2016).

2) Keberhasilan Dalam Menjangkau Sasaran

Keberhasilan sasaran dalam suatu program merupakan suatu pengukuran efektivitas dengan ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan dari suatu organisasi harus mempertimbangkan setidaknya dua hal yakni sasaran itu sendiri dan mekanisme untuk mempertahankan sasaran tersebut. Dengan kata lain, penilaian terhadap efektivitas sebisa mungkin dikaitkan dengan masalah yang ada dan tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas bisa diukur dengan memperhitungkan seberapa jauh program dapat dijangkau oleh sasaran agar program dapat terlaksana atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rachman, 2022).

3) Kepuasan Terhadap Program

Campbell berpendapat bahwasanya kepuasan menjadi salah satu kriteria efektivitas dengan mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok yang menerima bantuan, dan mereka mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya hal tersebut. Kualitas program

yang baik akan menghasilkan lebih banyak umpan balik dari penerima, yang dapat mengarah pada penilaian yang lebih akurat terhadap pembuatan dan pelaksanaan program atau proyek(Rachman, 2022).

4) Pencapaian tujuan menyeluruh

Indikator pengukuran yang terakhir menurut Campbell adalah dengan mengukur pencapaian tujuan dari program itu sendiri . Pengukuran ini dapat dilihat dengan melakukan pemantauan sudah sejauh mana sebuah organisasi melaksanakan tugas mereka untuk dapat mencapai tujuannya . Hal ini merupakan penilaian umum dengan menggunakan banyak kriteria dan akan menghasilkan penilaian secara umum atau secara keseluruhan (Rachman, 2022).

1.2 Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar atau yang disingkat PIP merupakan program dari pemerintah pusat yang memberikan bantuan bidang pendidikan berupa bantuan dana yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang orang tuanya memiliki keterbatasan dalam ekonomi atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan mereka. Adapun tujuan dari program Indonesia pintar adalah sebagai berikut : a)Meningatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah , dan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun, b)Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan c) Menarik siswa putus sekolah(drop out) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah /

sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya (Fiqih et al., 2022).

Program Indonesia pintar ini juga dapat dikatakan sebagai program jaminan sosial yang diberikan oleh negara, jaminan sosial ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak agar dapat menyelesaikan pendidikan mereka pada jenjang pendidikan tertentu. Menurut Standing(dalam Sulastomo,2008:5) “Jaminan Sosial adalah suatu sistem yang memberikan jaminan pendapatan untuk menghadapi risiko kontinjensi kehidupan, sakit dan bersalin, kecelakaan kerja, pengangguran, individualitas, hari tua dan kematian, penyediaan perawatan medis dan subsidi untuk keluarga yang memiliki anak”. Pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia karena dalam kenyataannya kehidupan membutuhkan suatu proses belajar untuk memastikan eksistensinya secara utuh dan seimbang, serta berperan dalam memajukan bangsa dan negara(Ngiode & Erwinsyah, 2020).

Program Indonesia pintar dalam hal ini merupakan hasil dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat seperti yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945(Retnaningsi, 2017). PIP merupakan program yang dilakukan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama (Gutama et al., 2021).

1.3 Kualitas Pendidikan

Kualitas merupakan tingkatan buruk atau baiknya sesuatu untuk mengetahui apakah program, kebijakan ,atau kinerja sudah mencapai target atau keberhasilan yang ingin dicapai atau belum. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan dalam proses tumbuh kembang seseorang. Kualitas dari pendidikan yang optimal akan menghasilkan pribadi atau manusia yang baik

dalam masyarakat dan dengan demikian masyarakat di masa yang akan datang dapat memiliki kualitas yang baik pula (Aini et al., 2023).

Kualitas pendidikan mempunyai peran vital dalam upaya untuk membentuk kepribadian dan juga karakter seseorang. Pendidikan yang baik dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk dapat memahami secara luas tentang dunia serta dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) memberikan definisi yang cukup komprehensif berkaitan dengan pendidikan berkualitas yang mencakup berbagai indikator mulai dari peserta didik yang bergizi baik, siap untuk berpartisipasi dan belajar, pembelajaran yang didukung keluarga dan masyarakat, lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung konten yang memuat unsur unsur perdamaian, proses inklusi yang berpusat pada anak yang difasilitasi oleh guru mandiri yang kompeten, dan hasil yang mencakup pengetahuan, keterampilan serta sikap yang mendukung kehidupan yang memiliki kaitan dengan tujuan nasional untuk pendidikan (Aini et al., 2023).

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan teori kualitas pendidikan dari Sammons. Menurut Sammons kualitas pendidikan adalah suatu konsep yang bergantung pada tujuan dan nilai yang ingin dicapai oleh suatu sistem pendidikan tersebut. Sammons berpendapat bahwa kualitas pendidikan setidaknya terdiri dari dimensi efisiensi (penggunaan sumber daya secara tepat dan efisien), dan dimensi kesetaraan (memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik). Kedua dimensi tersebut adalah dimensi yang memiliki kaitan cukup erat dengan tujuan dan prinsip-prinsip pelaksanaan program Indonesia pintar, tujuan pendidikan nasional, serta digunakan untuk mengetahui apakah tujuan dari program tercapai dan berjalan dengan efektif (Aini et al., 2023).

1.4 Faktor yang mempengaruhi efektivitas program

Program yang telah dirancang oleh suatu organisasi tentu dapat berjalan jika ada faktor yang mempengaruhi. Faktor adalah suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa, dan akan menjadi alasan mengapa program tersebut berhasil dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan program Indonesia pintar di sekolah menengah pertama negeri 2 Klaten. Adapun ketiga yaitu: sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta kondisi lingkungan ekonomi. Sarana dan prasarana memiliki pengertian semua fasilitas yang secara langsung dibutuhkan untuk dapat menjalankan suatu program, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak demi mencapai tujuan suatu program (Sutisna & Effane, 2022).

Menurut Arikunto & Yuliana (2012) sarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan proses kerja, baik berupa benda ataupun uang yang dibutuhkan Perusahaan (Sutisna & Effane, 2022). Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis (arti kata) berarti alat yang secara tidak langsung digunakan untuk menunjang proses kerja, seperti gedung, meja, kursi, serta alat dan media lainnya (Sutisna & Effane, 2022). Sedangkan Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam mengidentifikasi problem dan potensi-potensi yang ada didalam masyarakat tersebut. Hal ini akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, dan penanganan masalah, serta berguna untuk mendorong tata pemerintahan yang baik (Latif et al., 2019). Masyarakat harus menumbuhkan kesadarannya karena mereka sesungguhnya memiliki peran dalam keberhasilan pelaksanaan program.

Selanjutnya kondisi lingkungan, kondisi lingkungan bisa berasal dari budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial, hukum, dan geografi. Dalam penelitian ini

kondisi lingkungan yang turut mempengaruhi adalah kondisi ekonomi(Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020). Ekonomi sendiri merupakan cabang dari ilmu sosial yang objek nya berada pada individu dan masyarakat, secara etimologis dapat diartikan ekonomi terdiri dari bahasa Yunani yaitu “*oikos*” dan “*nomos*” yang berarti tata laksana rumah tangga. Menurut Rosyidi (2009:7) mendefinisikan bahwa “ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan demi mencapai kemakmuran”. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ekonomi adalah studi tentang orang dan masyarakat yang berfokus pada bagaimana orang dan masyarakat memenuhi kebutuhan mereka, yang terdiri dari banyak hirarki kebutuhan dan keinginan (Kurnianto, 2019).

1.5 Penelitian Terdahulu

Wirastiani et al.,(2019) Melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain, implementasi, proses, produk, serta analisis manfaat dan juga biaya pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan di SMP Negeri 7 Salatiga. Penelitian menggunakan model evaluasi kesenjangan (*Discrepancy Evaluation Model*) , teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah triangulasi. Hasil daripada penelitian ini yaitu (1)komponen desain dirumuskan dalam juknis PIP tahun 2015 meliputi aspek tujuan, proses, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (2) komponen implementasi masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan implementasi PIP dengan tujuan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga (3) komponen yang dapat dicapai adalah peserta didik dapat membeli keperluan sekolah, membayar

biaya administrasi (5) meskipun dana masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan setiap tahunnya, namun PIP memiliki manfaat yang sangat besar bagi siswa yang tidak mampu (Yusup et al., 2019).

Hartini (2017) Melakukan penelitian dengan judul “Program Indonesia Pintar : Implementasi kebijakan jaminan sosial bidang pendidikan (studi di Kota Kupang ,Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang ,Provinsi Sumatera Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam implementasi kebijakan PIP di lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi PIP di kedua kota tersebut belumlah optima akibat dari adanya intervensi elit politik lokal berupa pemaksaan nama-nama siswa yang harus diberikan bantuan(Retnaningsi, 2017).

Eni Rohaeni et al., (2018) Melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya Pemerataan Pendidikan” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Program Indonesia Pintar (PIP) diimplementasikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam konteks reformasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP melalui KIP dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya tim atau relawan yang sebelumnya telah mengerjakan KIP dan telah menyelesaikan semua tugasnya. Hal lain yang juga penting adalah siswa yang menerima dana KIP memenuhi persyaratan kondisi sosial sebagaimana tercantum dalam Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Akibatnya, siswa yang tidak terdaftar di sekolah atau yang tidak menerima pendidikan khusus dapat mendaftar ke sekolah

sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari pendidikan yang adil. Faktor yang menghambat pelaksanaan PIP melalui KIP: Informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya secara rutin dikirim ke sekolah-sekolah dan tersedia secara online

Putri Mutiara Rakista (2020) , Melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) studi kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini berfokus pada dampak program Indonesia pintar pada Tingkat sekolah dasar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, hasil daripada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi program Indonesia pintar pada Tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik, dtandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku (Rakista, 2021).

Fitroh et al., (2020) Melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas ,Pencegahan dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon”. Penelitian ini dilakukan di daerah mega proyek metropolitan Cirebon Raya (MCR) dan dilakukan dengan penelitian kualitatif model evaluasi bebas tujuan (*goal free evaluation*) dan menggambarkan hasil evaluasi program serta menganalisis dampaknya secara. Hasil dari penelitian ini adalah Program Indonesia Pintar (PIP) , yang dikelola mampu untuk memperluas akses pendidikan yang layak , mencegah anak putus sekolah dan mengakomodir kebutuhan bagi anak-anak yang terlanjut sudah putus sekolah (Uriyalita et al., 2020).

2. Definisi Konseptual dan Operasional .

2.2 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan turunan dari kerangka teori yang lebih dikerucutkan lagi, definisi konseptual juga merupakan salah satu unsur penelitian yang digunakan untuk menjelaskan variable dari sebuah masalah yang akan diteliti . Berikut ini merupakan definisi konseptual dari penelitian ini :

a) **Efektivitas Program**

Efektivitas merupakan hal pokok yang akan selalu ada dan menjadi alat ukur dalam sebuah program ataupun kebijakan. Kegiatan ataupun program, dapat dikatakan efektif apabila dalam proses untuk mencapai tujuan dari program atau kebijakan, menawarkan sebuah gagasan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sasaran dari program tersebut ,dan program tersebut telah tercapai sesuai dengan tujuan diawal. Ketika sebuah program direncanakan ,hanya akan berjalan efektif apabila dalam pelaksanaannya terdapat juga kesesuaian antara organisasi atau kelompok yang melaksanakan program tersebut dengan program yang dibuat, serta dapat diukur dengan membandingkan ketercapaian sebuah program sebelumnya dengan rencana yang sedang dirancang (Rachman, 2022). Makmur (2015:6) berpendapat bahwasanya efektivitas program merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya memperlihatkan ketepatan antara apa yang diharapkan atau harapan yang diinginkan dengan hasil yang telah dicapai(Nurul Najidah dan Hesti Lestari, 2019).

b) **Program Indonesia Pintar**

Program Indonesia Pintar adalah program yang dalam pelaksanaannya mendistribusikan bantuan berupa dana. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan universal atau rintisan wajib belajar selama 12 tahun sesuai dengan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan siswa ataupun mahasiswa yang memiliki permasalahan pada perekonomian mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat pendidikan, kemudian untuk menarik siswa yang putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan sekolahnya sampai dengan lulus. Dalam pengelolannya dibebankan kepada pengelola program tingkat satuan pendidikan baik di Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Pengelola dapat menerima usulan penerima program dari lembaga pendidikan, kemudian melakukan validasi terhadap usulan tersebut, melakukan sosialisasi dan kemudian menyalurkan bantuan (Gutama et al., 2021).

c) **Kualitas Pendidikan**

Kualitas merupakan tingkatan ukuran untuk mengetahui buruk atau baiknya suatu program, kebijakan, atau kinerja yang sudah mencapai target ataupun keberhasilan yang ingin dicapai. Pendidikan yang baik akan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan untuk dapat memahami dunia secara utuh serta membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif (Aini et al., 2023).

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan teori kualitas pendidikan dari Sammons. Menurut Sammons kualitas pendidikan adalah suatu konsep yang bergantung pada tujuan dan nilai yang ingin dicapai oleh suatu sistem pendidikan tersebut. Sammons berpendapat bahwa kualitas pendidikan setidaknya terdiri dari tiga dimensi yaitu efisiensi, kesetaraan, dan kepuasan (Aini et al., 2023). **Efisiensi** merupakan pelayanan yang dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan

dengan pelayanan yang diberikan. Dengan demikian pelaksanaan program Indonesia pintar akan dapat dijalankan dengan efisien apabila antara syarat dan pelayanan yang ditetapkan memiliki kaitan langsung dengan pencapaian tujuan program secara menyeluruh.

Selanjutnya adalah **kesetaraan**, dalam teori Sammons kesetaraan dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam penerapan program Indonesia pintar semua siswa yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi memiliki kesempatan yang sama dengan siswa yang memiliki kondisi perekonomian lebih stabil. Mereka memiliki beberapa persyaratan untuk nantinya bisa menerima dana bantuan dari program tersebut sehingga bisa menempuh pendidikan sampai dengan tamat. Setelah kesetaraan ada **kepuasan**, dalam teori ini kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan yang dirasakan oleh semua peserta didik, tenaga pendidik, dan orang tua para pendidik dengan sistem pendidikan yang diberlakukan. Program Indonesia pintar tentunya merupakan satu kebijakan yang termasuk dalam sistem pendidikan di Indonesia dengan fokus untuk memberikan pelayanan pendidikan universal selama 12 (dua belas) tahun kepada semua siswa, mencegah mereka agar tidak putus sekolah, dan menarik mereka kembali ke bangku sekolah.

d) **Faktor yang mempengaruhi efektivitas program**

Faktor adalah suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa, dan akan menjadi alasan mengapa program tersebut berhasil dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Indonesia pintar di sekolah menengah pertama negeri 2 Klaten. Adapun ketiga faktor tersebut yaitu: sarana-prasarana meliputi fasilitas, alat, uang semua hal yang secara langsung maupun tidak langsung membantu mempermudah pelaksanaan program. Selain itu ada juga partisipasi masyarakat yang diperlukan agar dalam pelaksanaan terdapat kerja sama yang baik antara pihak pengelola dan pihak yang menerima bantuan. Hal ini diperlukan agar dalam implementasinya dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan kondisi lingkungan yang berasal dari ekonomi, akan berpengaruh apabila adanya kesesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dengan tujuan yang direncanakan dalam program tersebut. Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan demi mencapai kemakmuran (Kurnianto, 2019). Bantuan program Indonesia pintar akan membantu masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan individu dalam mendapatkan pendidikan. Kondisi ekonomi tersebut akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah cara yang digunakan untuk dapat mengukur variable yang akan digunakan dalam penelitian dan telah ditentukan dalam definisi konseptual. Berikut ini tabel yang mendefinisikan operasional daripada variable yang akan di teliti :

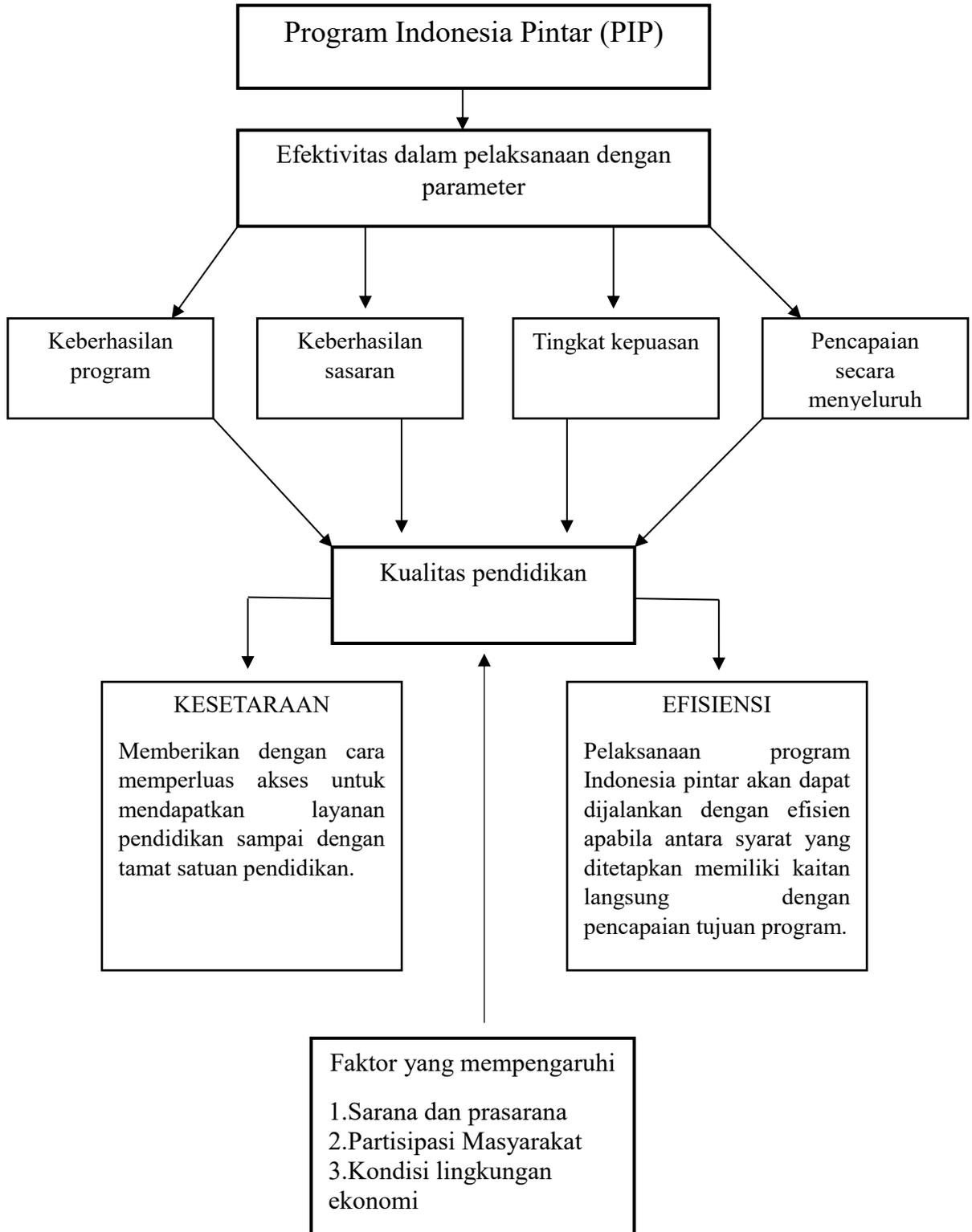
Tabel 1.6
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Efektivitas Program	Keberhasilan Program	I. Kesesuaian antara apa yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan
		II. Kesesuaian antara program dengan organisasi atau kelompok yang melaksanakan program tersebut.
		III. kesesuaian antara syarat yang ditetapkan oleh organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program .
		Keberhasilan sasaran Terdapat keterkaitan antara masalah yang ada dan tujuan yang telah direncanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kualitas Pendidikan	Tingkat Kepuasan Program	keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan individual atau kelompok yang menerima bantuan dan mereka mendapatkan kepuasan dari terpenuhinya kebutuhan mereka. Dalam hal ini kebutuhan untuk menempuh pendidikan
	Pencapaian Tujuan Menyeluruh	Melakukan pemantauan sejauh mana tugas organisasi telah dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal .
	Efisiensi	Pelaksanaan program Indonesia pintar akan dapat dijalankan dengan efisien apabila antara syarat yang ditetapkan memiliki kaitan langsung dengan pencapaian tujuan program. Karena dengan demikian sumber daya digunakan dengan tepat.
Faktor yang mempengaruhi efektivitas	Kesetaraan	Sammons kesetaraan dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan.
	Sarana dan Prasarana	Tersedianya fasilitas, bangunan, serta dana yang dibutuhkan agar program dapat berjalan
	Partisipasi Masyarakat	Para wali murid mengikuti sosialisasi sebagai bentuk partisipasi, sebagai partisipasi dalam pelaksanaan program.
	Kondisi lingkungan dari aspek ekonomi	Apakah kondisi ekonomi penerima bantuan mempengaruhi efektivitas prorgam

F. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan satu diagram yang menjelaskan garis besar alur pemikiran atau logika dalam berpikir yang akan menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan secara teoritis pertautan/keterkaitan antar *variable* yang digunakan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program Indonesia pintar merupakan salah satu program yang dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia dengan memperluas pelayanan di semua jenjang dan sampai dengan batasan usia yang sudah diatur. Kabupaten Klaten salah satu daerah yang mendapatkan bantuan Program Indonesia pintar dengan jumlah yang cukup tinggi. Program Indonesia Pintar sebagai satu kebijakan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan para siswa. Program Indonesia Pintar dalam pelaksanaannya di SMP N 2 Klaten tersebut perlu untuk diketahui sejauh mana efektivitas nya dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Ketika tujuan-tujuan tersebut telah tercapai, akan dilakukan analisis untuk mencari tahu apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut. Setelah itu akan dirumuskan kesimpulan apakah program ini mampu untuk meningkatkan kualitas atau malah sebaliknya. Dan apa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program Indonesia pintar di SMP N 2 Klaten. Agar dapat lebih mudah dalam memahami kerangka pemikiran penelitian, peneliti telah membuat bagan untuk dapat memudahkan dalam memahami alur pemikiran penelitian :

Bagan1.1
Kerangka berpikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistic(Sugiyono, 2018). Kemudian penulis akan menggambarkan fenomena tersebut dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata atau bahasa dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka-angka statistik.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini berada di Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan di sekolah menengah pertama negeri 2 Kabupaten Klaten. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini didasarkan dengan pertimbangan bahwasanya SMP N 2 Kabupaten Klaten merupakan sekolah yang memiliki dana bantuan terbanyak di Kabupaten Klaten. Selain dari itu, Kabupaten Klaten juga termasuk sebagai Kabupaten yang memiliki indeks Pembangunan manusia tertinggi di bandingkan beberapa kabupaten dan kota lainnya, sehingga peneliti melihat bahwa ada pengaruh yang ditimbulkan dari Kartu Indonesia Pintar tersebut.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari sumber asli atau objek yang sedang diteliti dan dapat berupa hasil observasi, wawancara , atau tes. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui orang lain ,hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti dokumen pemerintah, jurnal dan data lain yang sudah pernah diolah .

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2018). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini agar dapat menggali informasi lebih dalam lagi yang berkaitan dengan penelitian yang akan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Sedangkan pengumpulan data sekunder pada penelitian ini penulis menggunakan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi sendiri merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian (Atmojo Eko, 2022).

5. Sumber data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini baik primer maupun sekunder ,di tampilkan dalam tabel berikut .

Tabel 1.7
Sumber data

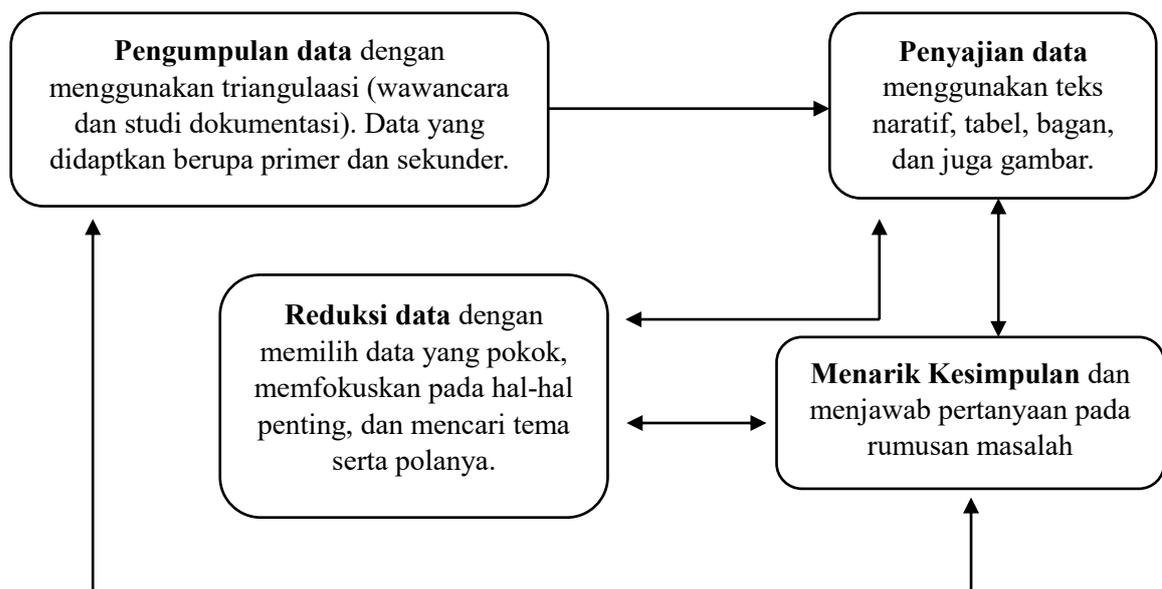
Sumber Data Primer	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah Informan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.	Wawancara	1 informan
Peserta didik penerima bantuan PIP di SMP N 2 Klaten	Wawancara	2 informan
Operator PIP dan dapodik SMP N 2 Klaten	Wawancara	2 informan

Dokumen monitoring dan evaluasi	Dokumentasi	-
Wali peserta didik penerima bantuan PIP	Wawancara	2 informan
Sumber data Sekunder	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah Dokumen
Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.	Studi Dokumentasi	1 dokumen
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.	Studi Dokumentasi	1 dokumen
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 .	Studi Dokumentasi	1 dokumen

6. Teknik analisis data

Proses analisis data kualitatif

Bagan 1.2



Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, triangulasi menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai keabsahan data, yang meliputi data yang dianalisis dan disusun dari beberapa sumber data dengan menggunakan berbagai metode dan waktu yang berbeda (Margono, 2010). Selain itu, triangulasi digunakan untuk meningkatkan konsistensi metode silang, seperti observasi lapangan, pengamatan, dan wawancara, atau metode serupa, seperti beberapa informasi yang dikumpulkan dalam waktu yang singkat (Alfansyur & Mariyani, 2020). Berikut ini merupakan tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi .

a. Pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk data sekunder, teknik ini digunakan agar dapat penulis dapat menggali informasi lebih mendalam berkaitan dengan penelitian yang akan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Adapun responden yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama yang telah menerima bantuan kartu Indonesia pintar, pihak dinas pendidikan

kabupaten Klaten yang mengelola kartu Indonesia pintar dan juga orang tua dari siswa-siswi yang menerima bantuan kartu Indonesia pintar .

b. Reduksi data

Reduksi data artinya melakukan rangkuman , memilih dan memilah data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta polanya (Sugiyono,2018). Reduksi data mengacu pada proses pengumpulan data, perhatian pada detail dalam penelitian, pengorganisasian data, dan transformasi data yang muncul dari dokumen-dokumen tertulis dalam sistem file. Proses kerja ini tidak pernah berhenti selama penelitian, bahkan sebelum data benar-benar mulai masuk, seperti yang dapat dilihat dari kerangka kerja konseptual penelitian, temuan penelitian, dan pendekatan peneliti dalam mengumpulkan data(Rijali, 2019). Dalam melakukan reduksi data, penulis akan fokus pada siswa dan sekolah penerima bantuan, pihak dinas pendidikan, guru ,dan orang tua siswa penerima bantuan.

c. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah melakukan penyajian data (*data display*). Analisis data adalah proses yang dilakukan ketika sejumlah besar informasi terkumpul, yang memungkinkan untuk dilakukannya analisis dan penulisan laporan. Teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan,tabel dan bagan dapat berupa bentuk penyajian data kualitatif. Format-format ini merangkum informasi dengan jelas dan sederhana, sehingga lebih mudah untuk melihat apa yang terjadi, apakah hasilnya memuaskan, atau sebaliknya, untuk melakukan analisis yang lebih menyeluruh.

d. Conclusion drawing / verification

Setelah melakukan penyajian data dan menganalisis , langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang sudah dikemukakan masih bersifat sementara , dan akan menjadi kuat apabila ditemukan bukti-bukti dalam proses penelitiannya (Sugiyono,2018). Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Setiap detail yang ditemukan dapat berupa representasi dari sebuah eksperimen yang sebelumnya masih remang-remang atau samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan sebuah teori.